Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI
MUSRENBANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

Disampaikan Oleh:

Dr. Drs. La Ode Ahmad Pidana Bolombo, A.P, M.Si

Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Kementerian Dalam Negeri

ASEAN INDONESIA 2023

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Disampaikan dalam acara Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provini Kalimantan Timur Tahun 2023 pada Rabu, 13 April 2023

ARAHAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024

TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan untuk:

Peningkatan dan Pemerataan
Pendapatan Masyarakat

Peningkatan dan Pemerataan
Kesempatan Kerja

Peningkatan dan Pemerataan
Lapangan Berusaha

Peningkatan dan Pemerataan
Akses dan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan dan Pemerataan
Daya Saing Daerah

Pembangunan Daerah :

Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014)

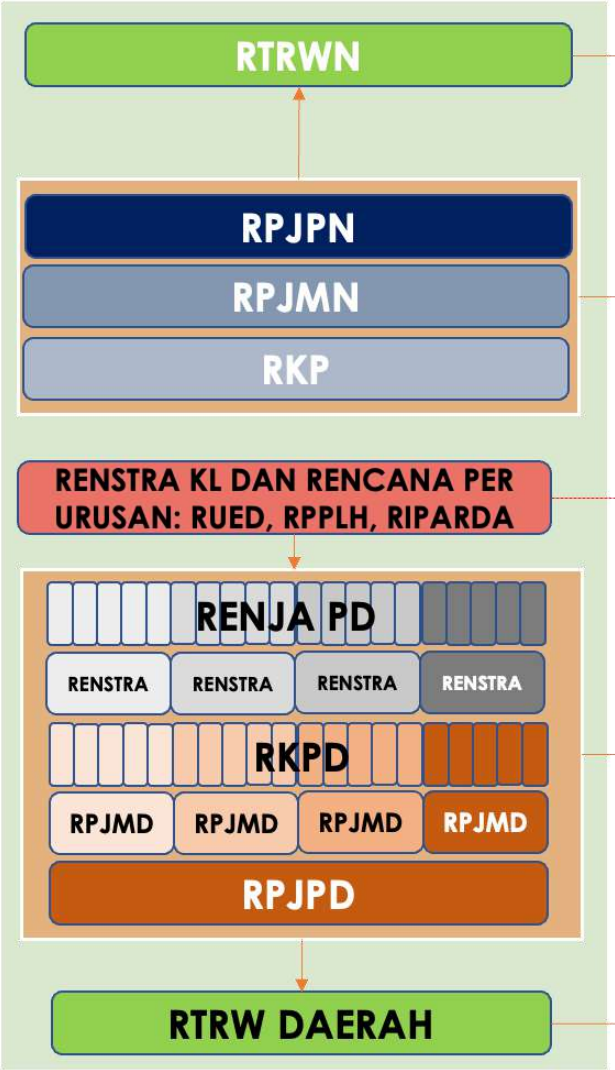

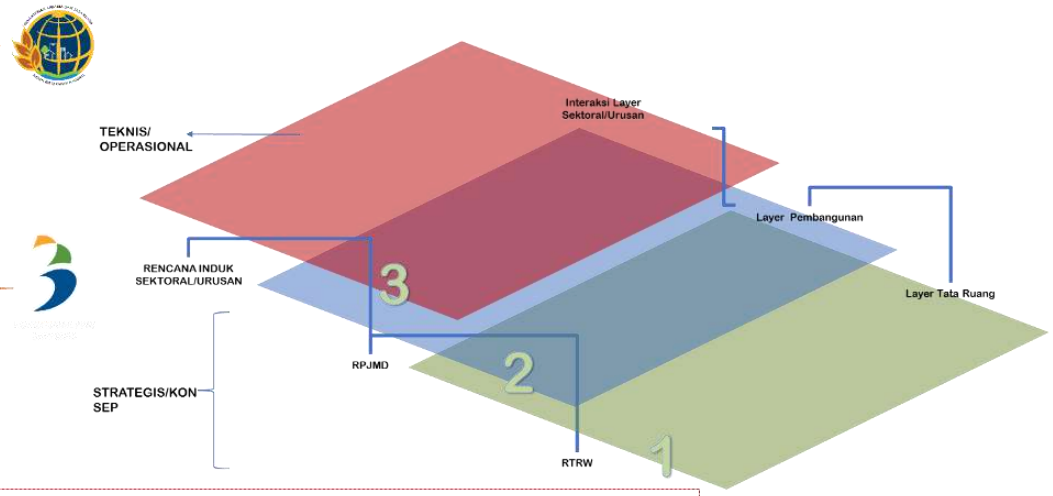

Pasal 258 UU 23/2014:
Pembangunan Daerah → perwujudan dari **pelaksanaan Urusan Pemerintahan** yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional

Pasal 20 UU 26/2007: RTRW menjadi pedoman untuk penyusunan RPJPN, RPJMN

1. **Sikronisasi**
   Perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan Pembangunan nasional, salah satunya antara lain dengan SEB (Surat Edaran Bersama) Menteri Dalam Negeri dengan Menteri PPN/Bappenas

2. **Konsistensi**
   direncanakan dibuat anggarannya dan apa yang dianggarkan telah (ada) dasar perencanaannya. Tidak boleh lagi ada program/kegiatan yang ada dalam dokumen APBD namun tidak ada dalam RKPD (dan juga sebaliknya).

SINKRONISASI RKP NASIONAL DAN DAERAH

TEMA RKP 2024

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

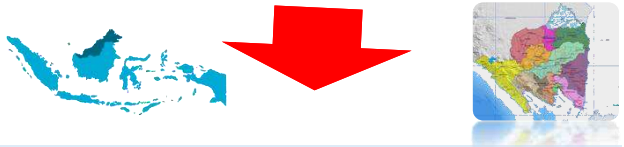

TEMA RKPD Prov. Kalimantan Timur 2024

"Peningkatan daya saing SDM dan Infrastruktur Wilayah yang Andal untuk percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan."

PRIORITAS RKP 2024

- Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
- Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
- Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

PRIORITAS RKPD KALIMANTAN TIMUR 2024

- Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja
- Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayannan rumah sakit dan fasyankes lainnya
- Penguatan upaya trasformasi ekonomi melalui diversifikasi vertical dan horizontal pada sector unggulan
- Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan
- Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang professional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik
- Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama

KONDISI & KINERJA MAKRO EKONOMI KALIMANTAN TIMUR

KONTRIBUSI KALTIM TERHADAP TOTAL PDRB

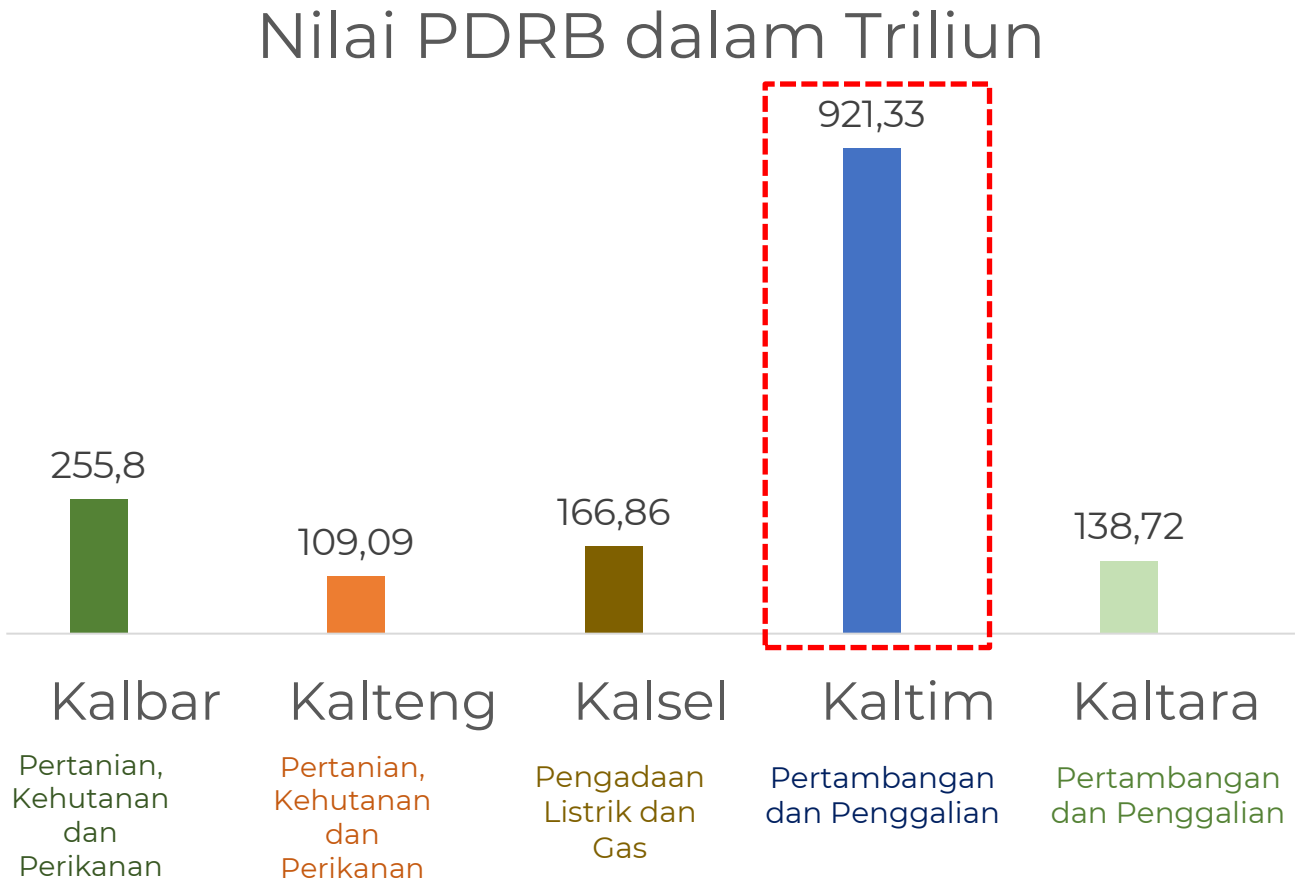

Kontribusi terbesar

Sumber: BPS, 2023 (diolah)

Persentase Terhadap Total PDRB 34 Provinsi

Kaltim	**4,81%**

Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Wilayah Kalimantan menurut Provinsi, 2022 (persen)

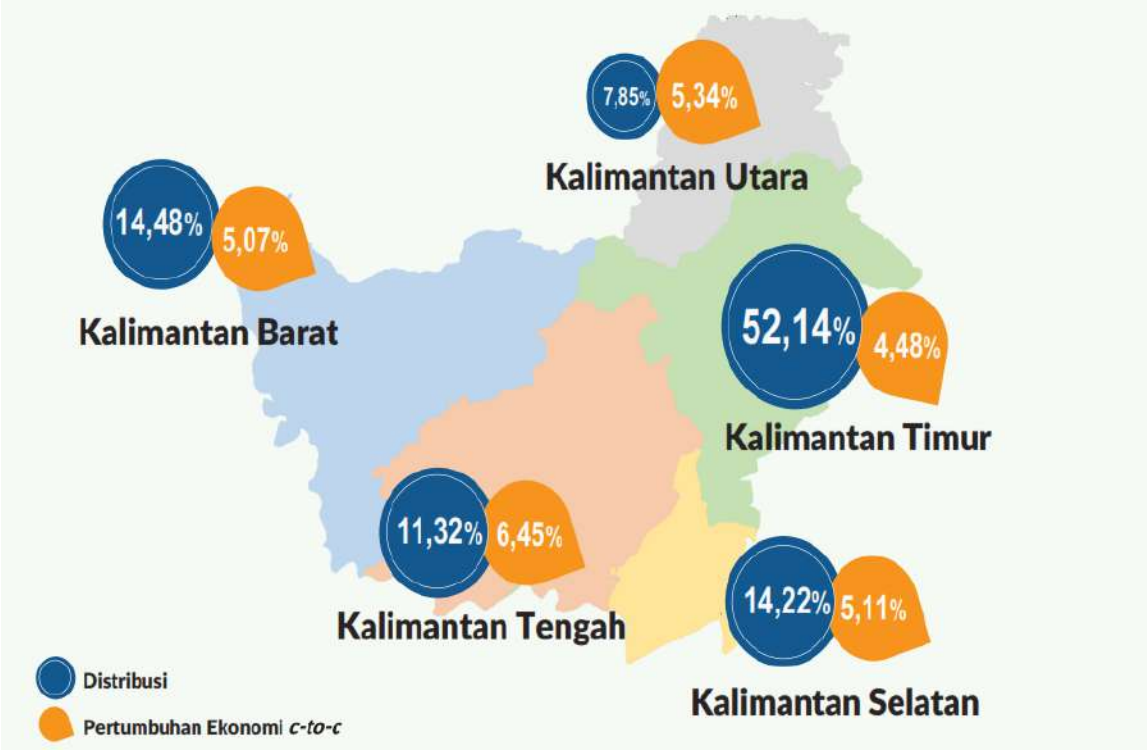

REALISASI INVESTASI PMA PMDN

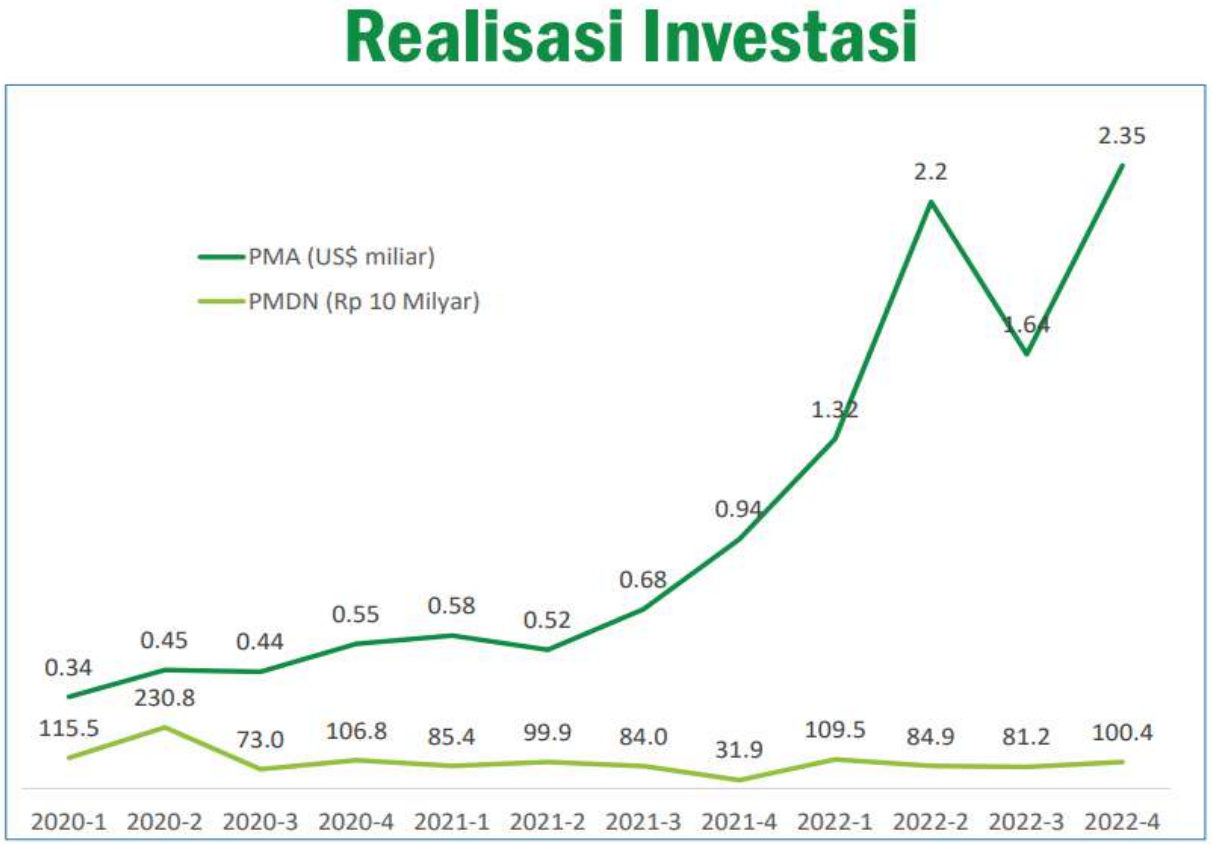

Sumber: https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik

PMA

	Proyek	Investasi (US$. Ribu)
Kalimantan Timur	486	1,266,221.9
Total	**486**	**1,266,221.9**

PMDN

	Proyek	Investasi (Rp. Juta)
Kalimantan Timur	4,219	39,595,633.0
Total	**4,219**	**39,595,633.0**

Sumber : BI, 2023

REALISASI PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2022

Target : Rp 994,28 triliun

Realisasi : Rp 1.234,28 triliun

Realisasi penerimaan:

- Pajak Penghasilan (PPh) yang mencapai Rp 719,6 triliun
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 449,29 triliun

Kinerja Provinsi Kalimantan Timur tercatat senilai Rp 7.632,59 Milliar (Rp 7,6 T)mengalami pertumbuhan sebesar 60,55% dibandingkan tahun 2021

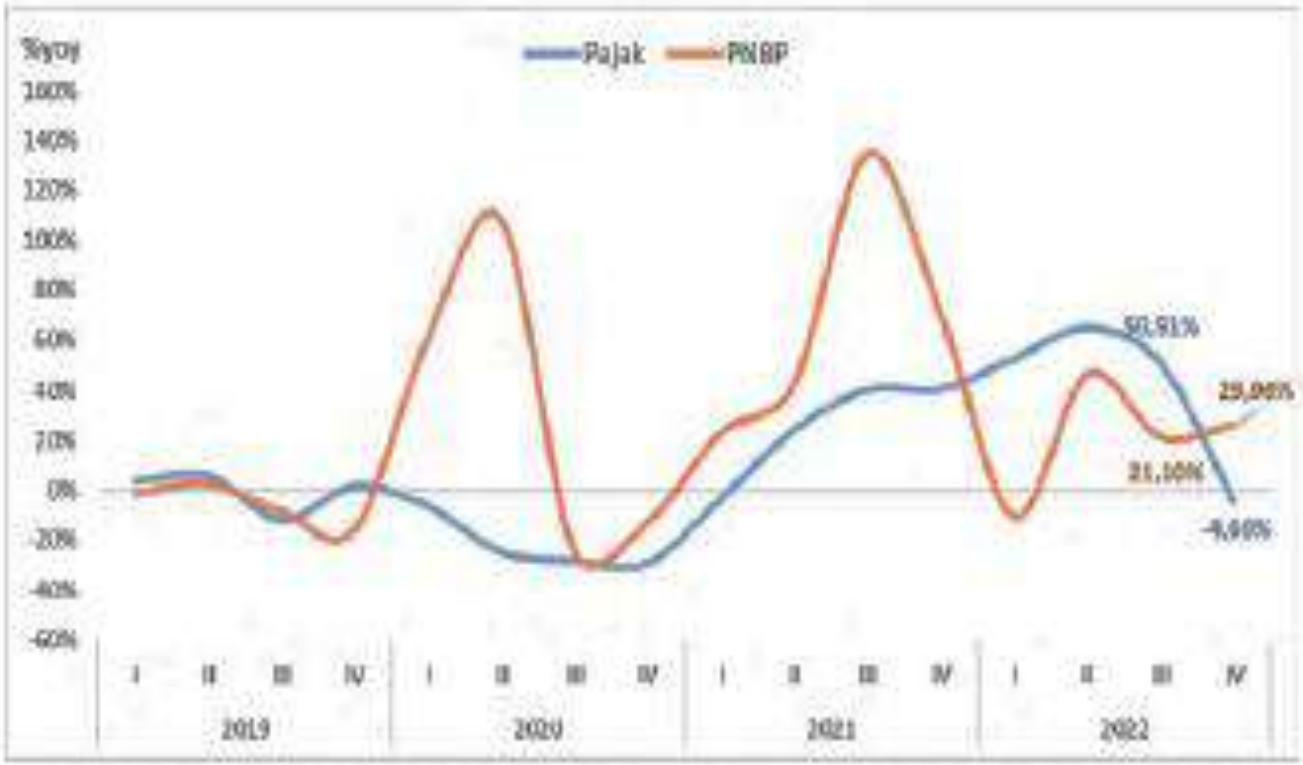

Sumber: BI, 2023 (diolah)

REALISASI INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pertumbuhan Ekonomi

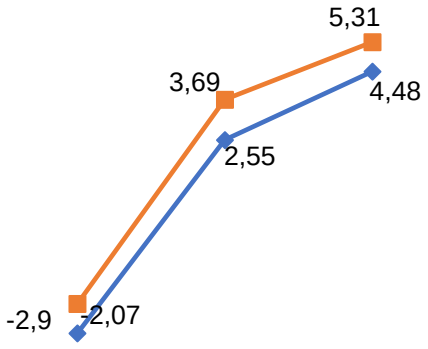

	2020	2021	2022
Kalimantan Timur	-2,9	2,55	4,48
Indonesia	-2,07	3,69	5,31

Pengangguran Terbuka

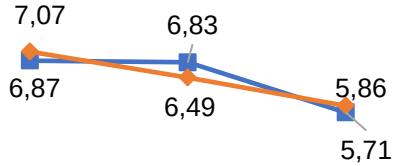

	2020	2021	2022
Kalimantan Timur	6,87	6,83	5,71
Indonesia	7,07	6,49	5,86

Gini Ratio

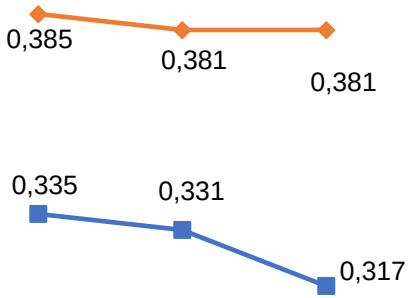

	2020	2021	2022
Kalimantan Timur	0,335	0,331	0,317
Indonesia	0,385	0,381	0,381

IPM

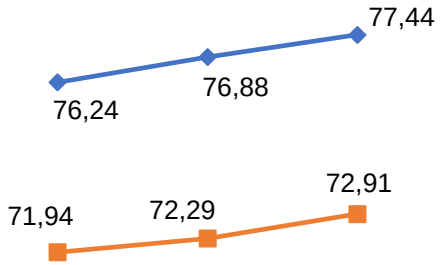

	2020	2021	2022
Kalimantan Timur	76,24	76,88	77,44
Indonesia	71,94	72,29	72,91

Tingkat Kemiskinan

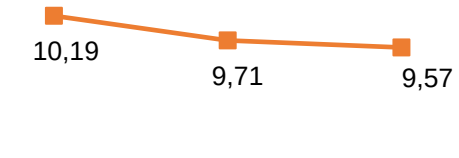

	2020	2021	2022
Kalimantan Timur	6,64	6,27	6,44
Indonesia	10,19	9,71	9,57

REALISASI APBD

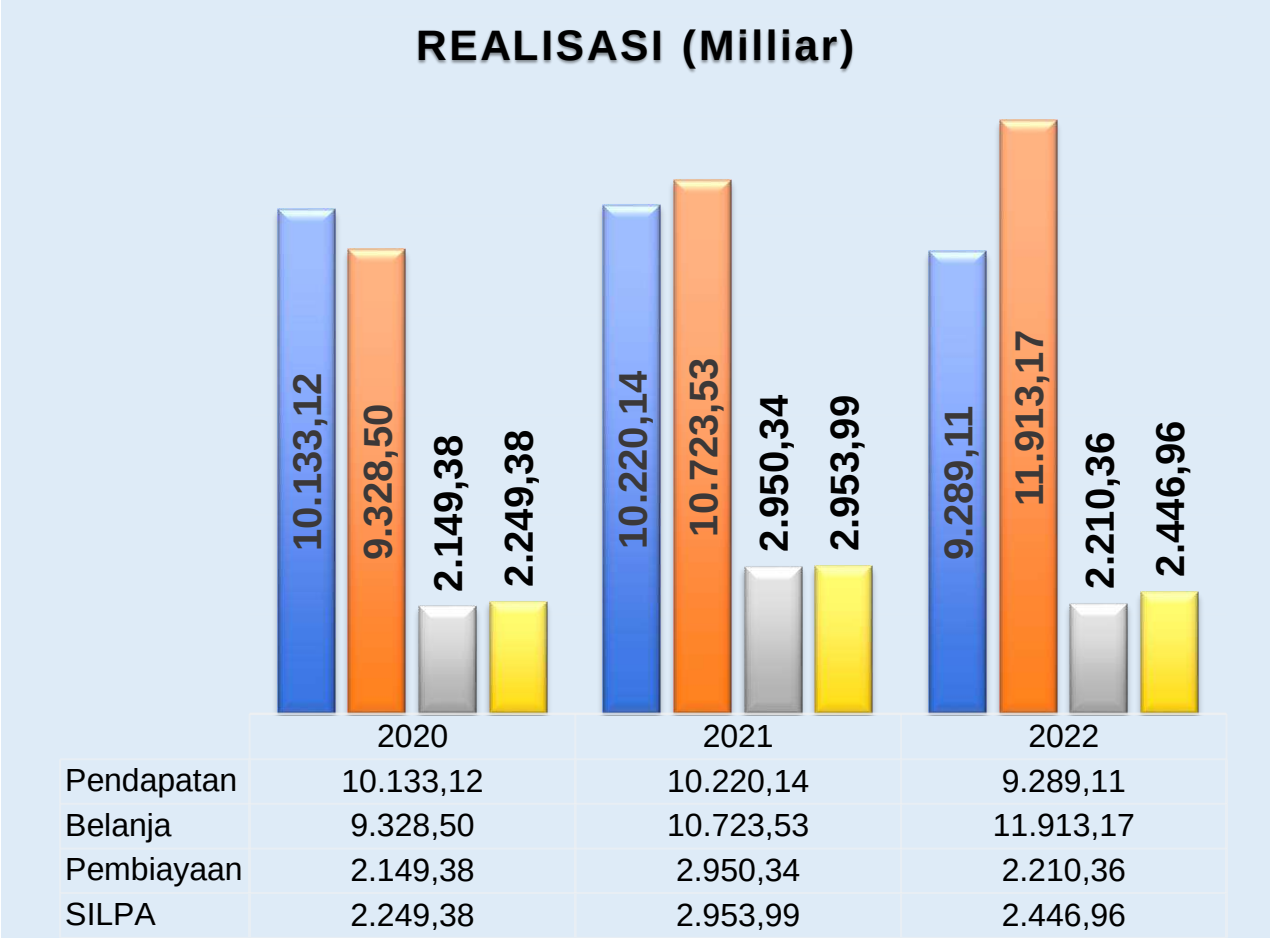

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd

- Pada tiga tahun ke belakang (2020-2022) APBD Provinsi Kalimantan Timur mengalami kondisi fluktuaktif dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan -4,13% dan Belanja 13,02% sedangkan pembiayaan sebesar 6,09%.

- Catatan: aspek belanja harus memperhatikan kemampuan pendapatan daerah. Alokasi APBD yang ada harus dibarengi dengan upaya peningkatan belanja yang focus untuk benar-benar menyelesaikan masalah

POTENSI KEWILAYAHAN

Destinasi Wisata Alam dan Pegunungan, Wisata Adat dan Situs Sejarah, serta Wisata Kuliner

1. Taman Nasional Kutai
2. Festival Erau
3. Bontang
4. Sungai Mahakam
5. Kepulauan Derawan
6. Pantai Biduk Biduk
7. Desa Budaya Pampang

Potensi sumberdaya alam

- Potensi bahan galian dan mineral

Pengembangan Potensi Energi Terbarukan

- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) (Panel Surya Muara Jawa)
- Potensi Bio Energi

Komoditas Unggulan Pertanian Tanaman pangan meliputi padi dan palawija, Hortikultura meliputi komoditas sayur-sayuran dan buah-buahan
Komoditas Hasil Ternak ternak Sapi, Kerbau, Ayam dan Itik
Komoditas Perikanan Ikan Kerapu, Udang Windu, dan Kepiting

Potensi Industri

Industri pengolahan pengilangan migas (Balikpapan), Bahan Kimia dan Produk Kimia: Oleokimia (Maloy), Bahan Kimia dan Produk Kimia: Petrokimia (Balikpapan) Industri Pertanian Berkelanjutan (Kawasan Industri Muara Jawa), Industri Logam dan Industri Perikanan (Kab.Kutai Kartanegara), Pusat badan litbang dan inovasi (IKN).

Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur termasuk **kategori Kawasan/Zona Rawan Bencana** :

- Kawasan Rawan Kebakaran Pemukiman, Lahan dan Hutan
- Kawasan Rawan Tanah Longsor
- Kawasan Rawan Kekeringan, Longsor dan Abrasi
- Kawasan Rawan Banjir
- Kawasan Rawan Cuaca Ekstrem

Pusat Ekonomi Tiga Kota

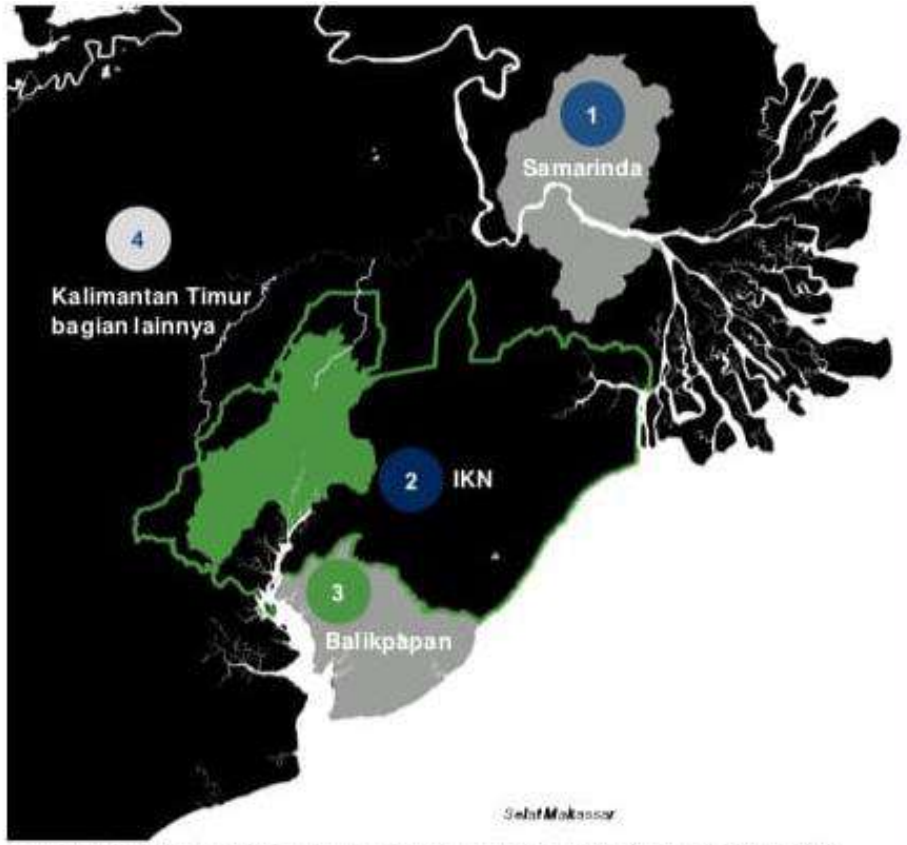

Delineasi KF-IKN dan K-IKN berdasarkan data Kementerian ATR/BPN yang diterima 26 Oktober 2020. Delineasi KIPP berdasarkan data Kementerian PUPR yang diterima 30 Oktober 2020. Peta delineasi akan mengalami revisi dan akan memerlukan konfirmasi dari Kementerian PPN/Bappenas.

1	**Jantung: Pusat Sejarah Kaltim & sektor energi yang diperbarui**
	• Model tambang batu bara berkelanjutan • Peningkatan dari sektor energi baru terbarukan dan rendah karbon • Peningkatan dari sektor ekowisata, pariwisata kebugaran, dan pariwisata bisnis
2	**Saraf: Kawasan Pusat Pemerintahan dan Pusat Inovasi Hijau**
	• Pusat pemerintahan dan layanan masyarakat • Pusat layanan digital smart city • Pusat pendidikan abad ke-21 • Pusat pariwisata kota dan medis • Basis sektor-sektor berbasis teknologi
3	**Otot: Pusat Petrokimia dan Logistik bagi Kalimantan Timur**
	• Pusat sektor petrokimia dan OEM • Peningkatan dari kegiatan logistik dan pengiriman barang di sektor manufaktur dan ekspor seperti E2W, farmasi, dan industri pertanian • Peningkatan dari sektor ekowisata, pariwisata kebugaran, dan pariwisata bisnis
4	**Paru-paru: Pusat Pertanian dan Ekowisata Hulu**
	• Peningkatan dari sektor ekowisata dan pariwisata kebugaran • Peningkatan dari produksi pertanian hulu untuk manufaktur pertanian hilir

ARAHAN PENYUSUNAN RKPD KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

HIGHLIGHT KEBIJAKAN RANCANGAN AWAL RKP TAHUN 2024

Sasaran Pemb. 2024

- Pertumbuhan Ekonomi: **5,3-5,7%**
- Rasio Gini: **0,374-0,377 (nilai)**
- Tingkat Kemiskinan: **6,5-7,5%**
- Pengangguran Terbuka: **5,0-5,7%**
- IPM: **73,99-74,02**
- Penurunan Emisi GRK: **27,27%**

Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kalimantan 2024

- Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paruparu dunia **(Heart of Borneo)** dengan menjaga kawasan berfungsi pelestarian lingkungan dan ekologis
- Meningkatkan **konservasi dan rehabilitasi** DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi.
- Mengembangkan **pencegahan bencana alam** banjir dan kebakaran hutan.
- Mempertahankan peran sebagai **lumbung energi** nasional melalui pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan.
- Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa.
- **Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)** di Kalimantan Timur untuk mendorong diversifikasi ekonomi dan meningkatkan output sektor ekonomi non tradisional, perdagangan antarwilayah, kesempatan kerja dan menurunkan ketimpangan pendapatan, serta menciptakan peluang investasi baru dan peningkatan kontribusi investasi Pulau Kalimantan terhadap nasional.

Indikator Pembangunan

- Nilai Tukar Petani: 105-108 (nilai)
- Nilai Tukar Nelayan: 107-110 (nilai)

Major Project RKP 2024

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
4. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
5. Penguatan daya saing usaha
6. Pembangunan Ibu Kota Nusantara
7. Pelaksanaan Pemilu 2024

Sumber Bappenas, Kick Off RKP Tahun 2024

RAKORTEKRENBANG 2024

Rakortekrenbang merupakan bagian dari proses penyusunan Rancangan Awal RKP dan RKPD dengan tujuan untuk menjadi diskusi awal terkait dengan sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian target pembangunan nasional

28 Feb – 10 Maret 2023

MAKSUD

- Melakukan konfirmasi terhadap program prioritas nasional, kesiapan lokasi dan target program prioritas
- Mengidentifikasi dan memastikan dukungan daerah dalam pencapaian target pembangunan yang menjadi prioritas nasional
- Mengidentifikasi dan memastikan dukungan pusat melalui APBN dalam pencapaian target pembangunan yang menjadi prioritas daerah

TUJUAN

- Penyelarasan program, kegiatan, proyek, target, lokasi, dan anggaran pembangunan nasional antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
- Terwujudnya pencapaian target pembangunan nasional secara sinergis antara Pusat-Daerah

ARAHAN TINDAK LANJUT

- Pemerintah Kab/Kota memperhatikan arahan kebijakan Provinsi dalam pelaksanaan Rakortekrenbang Tingkat Provinsi, sehingga hasil kesepakatan Rakortekrenbang Tingkat Pusat tidak hanya menjadi kesepakatan yang disepakati oleh Pusat dengan Provinsi namun benar-benar ditindaklanjuti dan dikontribusikan oleh Kabupaten/Kota;
- Melaksanakan berbagai hasil kesepakatan untuk ditindaklanjuti dalam RKPD Tahun 2024 sehingga kinerja sinkronisasi dapat dikendalikan dengan optimal.

*Hasil Pembahasan Sinkronisasi Indikator Makro Rancangan RKP dan Ranwal RKPD Provinsi Tahun 2024

HASIL RAKORTEKRENBANG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

Dukungan Prioritas Urusan Nasional Tahun 2024

481 Sub Kegiatan dukungan kinerja urusan.

Rp. 2.755.059.321.386

Dukungan pagu terhadap kinerja urusan.

3 Urusan dengan dukungan pagu terbesar

- 48,5% Ur. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 26,9% Ur. Pendidikan
- 7,4% Ur. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Hasil Pembahasan Target Indikator Makro Pembangunan Tahun 2024

1. Pertumbuhan Ekonomi:4.00-5.00%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka: 5,46%
3. Indeks Pembangunan Manusia: 78,14;
4. Rasio Gini: 0,307;
5. Tingkat Kemiskinan: 5,78%

20 Usulan Proyek Kegiatan Tahun 2024

4 Diakomodir | 15 Dibahas Lbh Lanjut | 1 Ditolak

Usulan Proyek Diakomodir:

- Preservasi Jalan Sangatta – Sp. Perdau – Akses Pelabuhan Maloy Baru
- Pembangunan Jalan Tering – Ujoh Bilang – Long Bagun – Long Pahangai
- Preservasi Jalan Batas Tenggarong – Sp. Blusuh – Batas Kalteng
- Preservasi Jalan Barong Tongkok – Sp. Tering – Batas Mahulu

Sumber: https://rakortek.sipd.kemendagri.go.id/

PENGOPTIMALAN SIPD DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

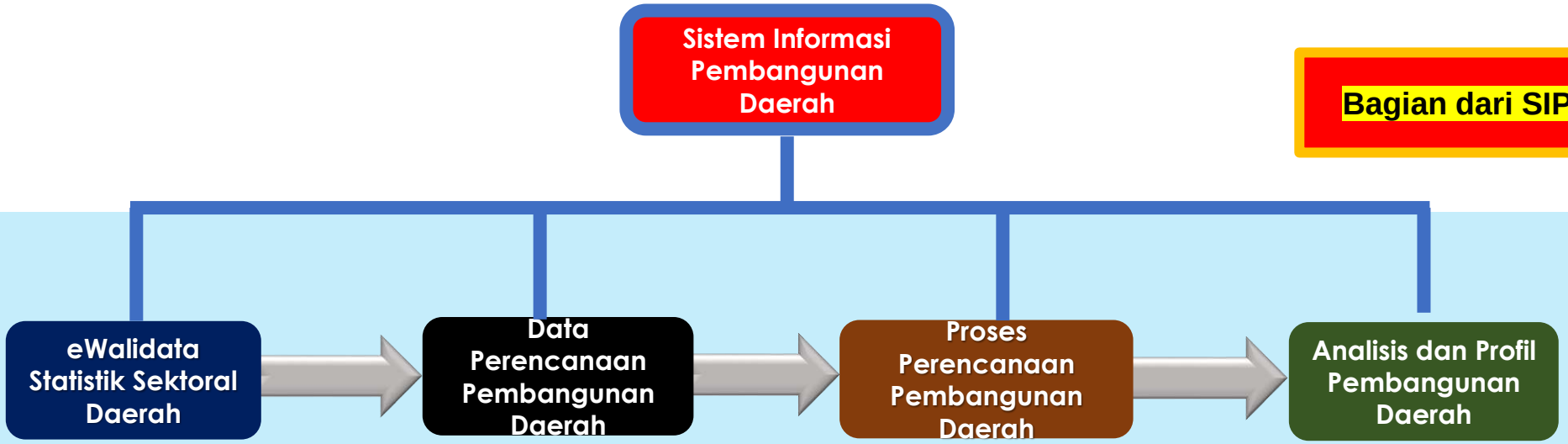

- **Sistem Informasi Pembangunan Daerah** dimulai dari proses e-walidata, kemudian data perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya proses perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan daerah
- **Proses e-walidata** berisikan tahapan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data yang melibatkan walidata, produsen data dan pembina data, proses ini **menjamin data dan informasi yang valid** sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.
- **Data Perencanaan Pembangunan Daerah** adalah **proses sinkronisasi data pusat dan daerah** yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah berdasarkan **7 (tujuh) aspek informasi** yaitu geografis, demografis, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- **Proses perencanaan pembangunan daerah** yang komprehensif, memanfaatkan data dari eWalidata dan sinkronisasi data **menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah** yang berkualitas.
- **Analisis dan profil** memberikan **gambaran kondisi pembangunan daerah, capaian target-target dan tujuan pembangunan daerah**, serta **proyeksi pembangunan daerah** ke depan

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGENDALIAN INFLASI

1. Kepala Daerah terus **memonitor setiap minggu** Serta menjaga pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi

2. **Kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah sangat penting** dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional (Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan **agregat penjumlahan** dari Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota)

3. **Pelaksanaan rapat TPID secara regular rutin (Mingguan)**, Sekda sebagai Kasatgas Pangan agar mengendalikan harga pangan

4. Daerah-daerah yang kurang terkendali **segera lakukan tervensi p gendalian**, pemerintah pusat juga memonitor melalui TPIP (Khususnya tarif PLN, PDAM, angkutan kota)

Inflasi Tahun ke Tahun *(Maret 2023 terhadap Maret 2022)*	**4,97%**
Inflasi Bulan ke Bulan *(Maret 2023 terhadap Februari 2023)*	**0,18%**
Inflasi Tahun Kalender *(Maret 2023 terhadap Desember 2022)*	**0,68%**

Perkembangan inflasi (%)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
	2022												2023		
m-to-m	0.56	-0.0	0.66	0.95	0.40	0.61	0.64	-0.2	1.17	-0.1	0.09	0.66	0.34	0.16	0.18
y-on-y	2.18	2.06	2.64	3.47	3.55	4.35	4.94	4.69	5.95	5.71	5.42	5.51	5.28	5.47	4.97

PENGENDALIAN INFLASI

Inflasi dipengaruhi oleh komponen penyumbang inflasi, antara lain:

- **Inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya diatur pemerintah *(Administered Prices)***
- **Inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya sangat bergejolak *(Volatile Goods)***

Inflasi *Administered Prices*

adalah inflasi barang/jasa yang **perkembangan harganya diatur pemerintah**. **Harga suatu barang atau jasa *Administered Prices* yang beredar dimasyarakat berdasarkan aturan pemerintah**

Contoh barang/jasa *Administered Prices* diantaranya*:*

Tarif Dasar Listrik

Bahan Bakar Minyak

Tarif Transportasi

Inflasi *Volatile Goods*

adalah inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya sangat bergejolak. Inflasi *volatile goods* didominasi bahan makanan sehingga sering disebut juga sebagai *volatile foods*

Contoh barang/jasa *volatile foods* diantaranya*:*

Ayam Ras

Cabai Rawit

Beras

KEMISKINAN EKSTREM

Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Indonesia periode **September tahun 2022** sebesar **26.363.270 juta jiwa atau 9,57%** dari penduduk Indonesia

Definisi Kemiskinan

- Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, **kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran**. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah **Garis Kemiskinan (GK).**
- Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan **nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan**, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan.
- Angka kemiskinan **Provinsi** diukur **dua kali dalam setahun oleh BPS** yaitu periode **Maret dan September** sedangkan **Kabupaten/Kota diukur satu kali** dalam setahun yaitu periode **Maret**

Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan Ekstrem diukur menggunakan ***"absolute poverty measure"*** yang konsisten antar negara dan antar waktu.

Miskin ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan **ekstrem-setara dengan USD 1.9 *Purchasing Power Parities (PPP).***

Tingkat kemiskinan ekstrem September 2022 sebesar 1,74%

Definisi Kemiskinan Ekstrem

- **Secara internasional, kemiskinan esktrem adalah masyarakat yang memiliki pendapatan kurang dari U$ 1,9 PPP (*purchasing power parities*).** *Purchasing Power Parities* (PPP) adalah **indeks harga internasional** yang diukur dengan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli sekeranjang barang yang sama di setiap negara yang dilakukan pembanding dengan menggunakan US $.
- **Contoh konsep *Purchasing Power Parities* (PPP),** jika harga satu buah pisang di USA adalah US $ 1.00, sedangkan di Indonesia adalah Rp 500, maka *Purchasing Power Parities* (PPP) tersebut adalah US $ 0,002/Rupiah. Dalam laporan *Poverty & Equity Brief East Asia & Pacific* (2019) bahwa pada tahun 2017 nilai US $ 1,9 PPP = Rp10.195,6 per kapita per hari. Pada tahun 2022, nilai US $ 1,9 PPP = **Rp.10.739** per kapita per hari atau **Rp.322.170** per kapita per bulan.
- **Setidaknya, ada 3 (tiga) hal yang bisa dipahami sebagai penyebab kemiskinan ekstrem,** yaitu **1) kondisi sosial-budaya; 2) keterbatasan sumber daya; dan 3) keterisolasian, rendahnya pendidikan, kesehatan, dan keterbatasan akses terhadap lapangan kerja**. (Sumber: Bank Dunia).

INSTRUKSI BAPAK PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

Ditetapkan tanggal 8 Juni 2022

1. **Mengambil langkah-langkah** yang diperlukan **sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan** masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem

2. **Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem** secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:
   a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat; dan
   c. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Catatan:

1. **Inpres ini menjadi landasan hukum bagi Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah** dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% di tahun 2024.
2. Sebagai tindak lanjut Inpres tsb: Keputusan Menko PMK No 25/2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022 – 2024; Keputusan Menko PMK No. 30/2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; dan Keputusan Menko PMK No. 32/2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

RENCANA KERJA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM (PPKE)

	Implementasi Tahap I	Implementasi Tahap II	Implementasi Tahap III	Target
Program	Bantuan Langsung Tunai Tambahan	• Penguatan pelaksanaan program pengurangan beban • **Pemberdayaan ekonomi masyarakat** • Peningkatan kinerja pensasaran melalui perbaikan data, termasuk pengembangan *social registry*		
	35 kabupaten/ kota prioritas di 7 provinsi	212 kabupaten/kota prioritas perluasan	514 kabupaten/kota prioritas dengan perluasan nasional secara bertahap	**Kemiskinan ekstrem mencapai 0%**
	Tingkat kemiskinan: 10,19% Kemiskinan ekstrem: 3,8%	Tingkat kemiskinan: 9,2-9,7% Kemiskinan ekstrem: 3-3,5%	Tingkat kemiskinan: 8,5-9% Kemiskinan ekstrem: 2,5-3%	Tingkat kemiskinan: 6-7% Kemiskinan ekstrem: 0-1%.
	Oktober – Desember 2021	**2022**	**2023 - 2024**	**2024**
	Model Konvergensi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem	Evaluasi Model Konvergensi untuk Wilayah Perluasan	Adopsi Model KonvergensiNasional	

PROGRAM JANGKA PENDEK
Pemberian bantuan langsung tunai tambahan yang difokuskan di 35 wilayah prioritas

PROGRAM JANGKA MENENGAH
Diutamakan pada konvergensi program pemberdayaan dan perlindungan sosial (bansos/jamsos), khususnya memastikan pemberian bansos pada kelompok miskin ekstrem serta pengembangan *social registry*.

Memastikan layanan dasar termasuk kesehatan, gizi, listrik, sanitasi, dll

Sumber: Pemutakhiran data Kemendagri yang tergabung dalam Koordinasi KemenkoPMK, 2023

PENURUNAN STUNTING

21,6% Balita di Indonesia mengalami *stunting* (SSGI, 2022)

TARGET PENURUNAN STUNTING (%)					
2019	2020	2021	2022	2023	2024
27,7%	24,1%	21,1%	18,4%	16%	14%

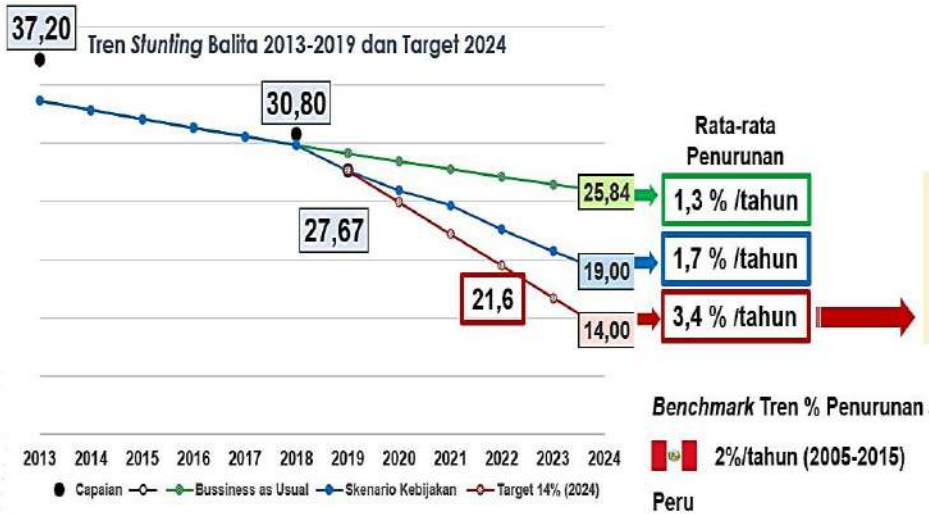

Target 2024:
Penurunan 2X lipat dari Tren Saat Ini
Perlu Kerja Keras

PREVALENSI BALITA *STUNTING* (TINGGI BADAN MENURUT UMUR) BERDASARKAN PROVINSI, SSGI 2022

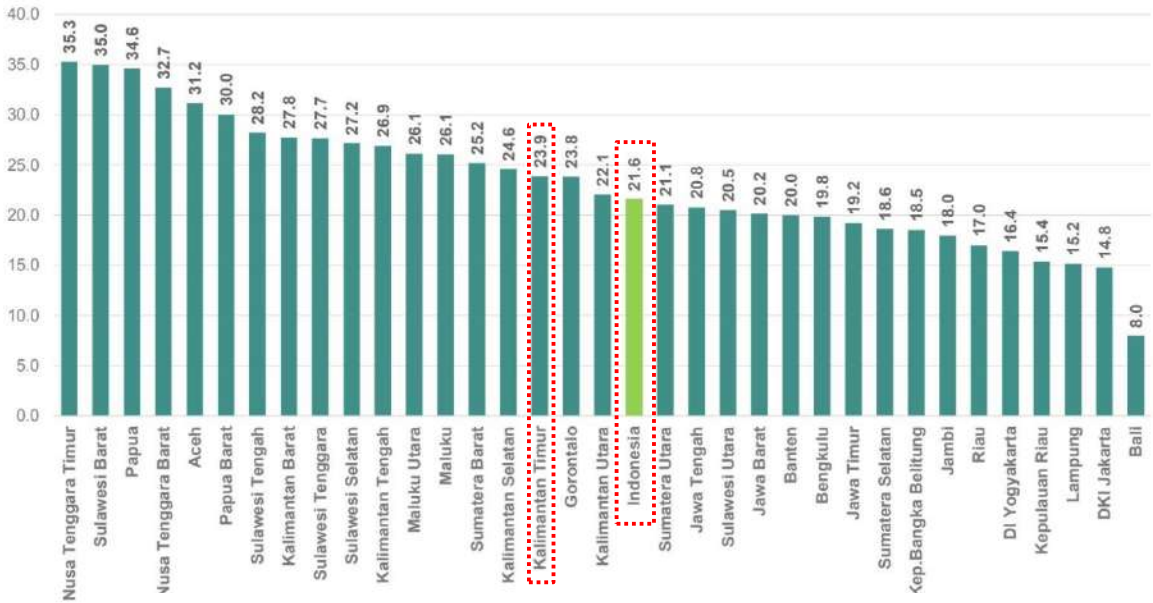

PREVALENSI BALITA *STUNTING* (TINGGI BADAN MENURUT UMUR) BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, SSGI 2022

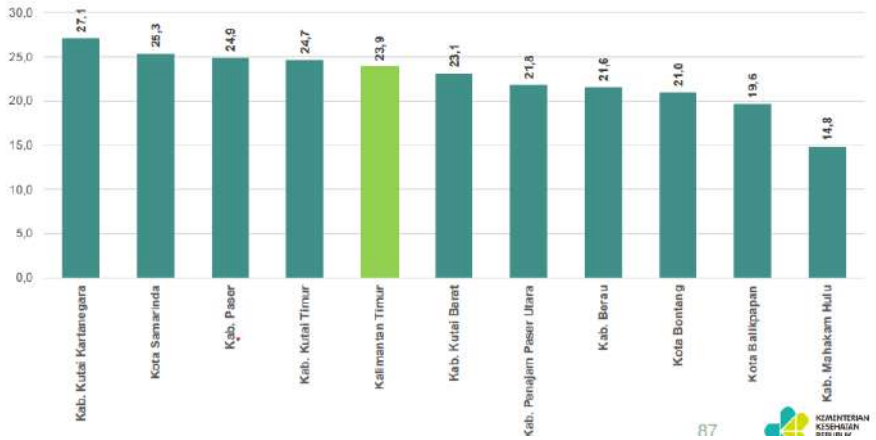

1. Data detail Ibu hamil, Anak-anak di bawah 2 tahun ***by name by address*, data berasal dari *bottom up* (dari desa ke Kab/Kota --> Provinsi).**
2. Membuat ***inovasi*** penanganan, seperti pembuatan ***platform (aplikasi pelaporan berbasis digital)*** dll
3. Melakukan **intervensi** kepada yang kurang mampu melalui **bantuan sosial makanan bergizi (konsumsi ikan bukan mie instan atau biskuit).**
4. Provinsi melaksanakan kepada Kab/Kota.

APBD

TREN 3 BULAN TERAKHIR PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN APBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2021-2022

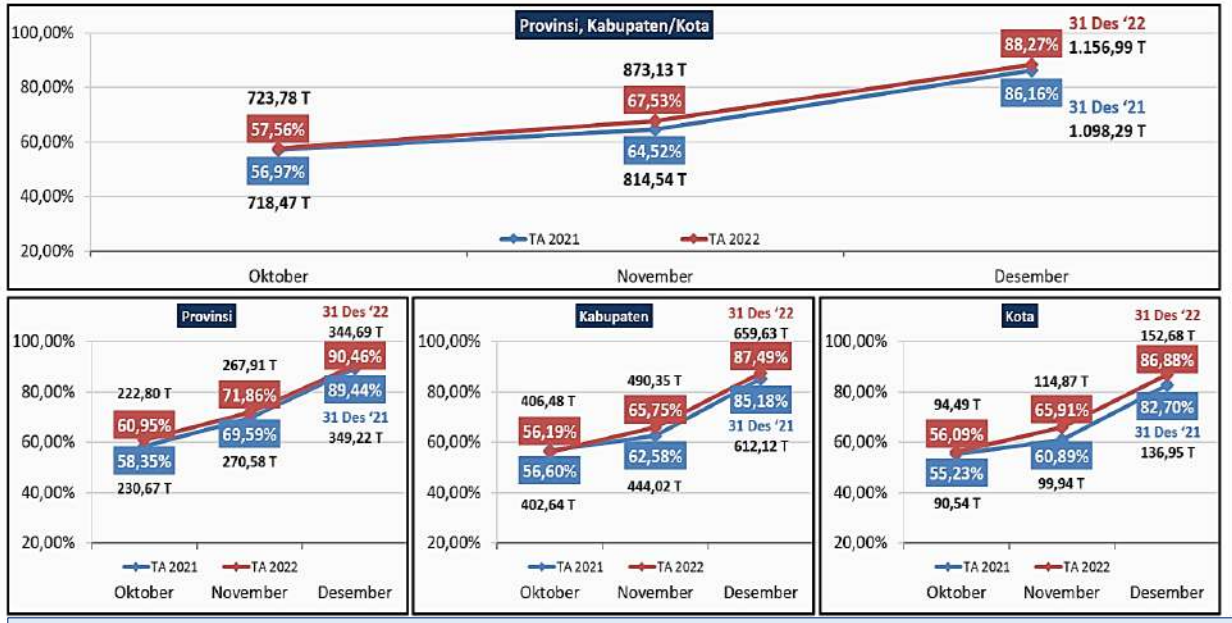

TREN 3 BULAN TERAKHIR PERSENTASE REALISASI BELANJA APBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2021-2022

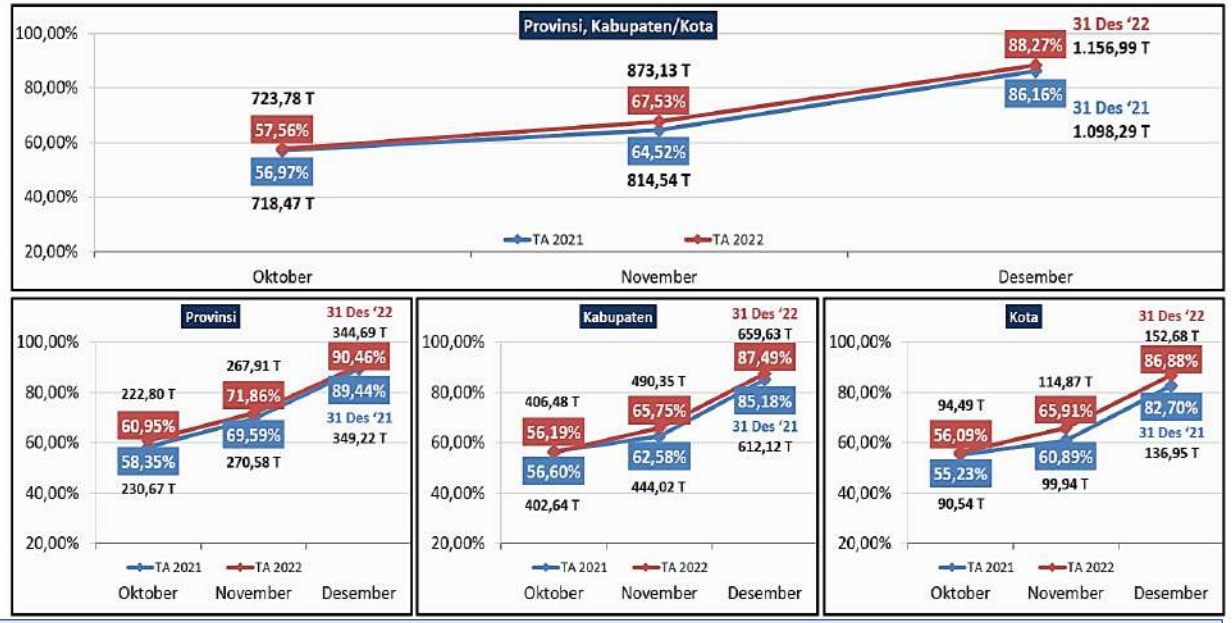

1. Situasi Pandemi Covid-19 yang sudah terkendali dan pencabutan PPKM akan memulihkan situasi pertumbuhan ekonomi, dengan demikian **pendapatan harus mencapai realisasi 100% persen atau lebih dari target**.
2. Perencanaan **target realisasi** pendapatan dan belanja **Per Kuartal**.
3. **Monitoring dan evaluasi** dengan melaksanakan **Rapat Gubernur bersama Kab/Kota** untuk memantau realisasi APBD (Belanja maupun Pendapatan).
4. Pelaksanaan belanja APBD **tidak diakhir tahun**, dibuat **target perkuatal realisasi belanja**.

PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024

PEMILIHAN UMUM
Tanggal 14 Februari 2024

DASAR HUKUM

1. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** tentang Pemilihan Umum (Ditetapkan Tanggal 15 agustus 2017)
2. **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022** tentang Perubahan atas UU No 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Ditetapkan Tgl 12 Desember 2022)

1. Untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029
2. Untuk memilih Anggota Legislatif:
   a. DPD RI sebanyak 152 Orang*
   b. DPR RI sebanyak 580 Orang*
   c. DPRD di 38 Provinsi sebanyak 2.372 Orang*
   d. DPRD di 508 Kab/Kota sebanyak 17.510 Orang*

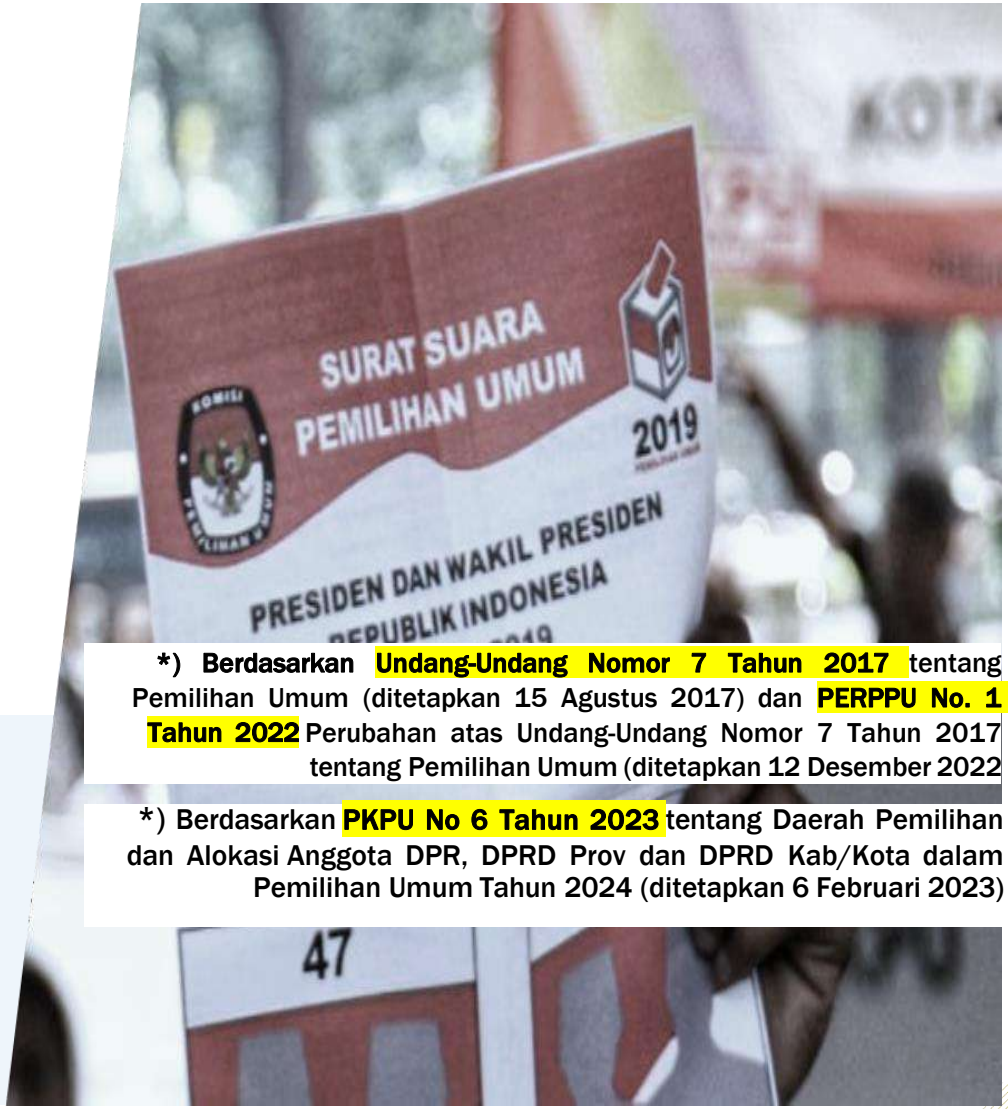

*) Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** tentang Pemilihan Umum (ditetapkan 15 Agustus 2017) dan **PERPPU No. 1 Tahun 2022** Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (ditetapkan 12 Desember 2022

*) Berdasarkan **PKPU No 6 Tahun 2023** tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Anggota DPR, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (ditetapkan 6 Februari 2023)

INDIKATOR KEBERHASILAN PEMILU

1. Berlangsung **aman dan lancar** sesuai aturan yang berlaku
2. **Partisipasi Pemilih yang tinggi**
3. **Tidak terjadi konflik** yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa terutama konflik kekerasan
4. **Pemerintahan yang ada tetap berjalan lancar** baik di Pusat maupun Daerah

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMILU & PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

KELANCARAN OPERASIONAL
dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh KPU dan KPUD di daerah masing-masing secara paralel jajaran pemerintah mengikuti semua perkembangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dan memberi dukungan saat diperlukan.

FASILITASI PENGEMBANGAN *NETWORKING*, HARMONISASI ANTARA HUBUNGAN KERJA
semua stakeholder pelaksana Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di daerah (KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, Panswaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Parpol, Masyarakat, Perguruan Tinggi, serta jajaran pemerintah sendiri).

KEAMANAN PADA JAJARAN PENANGGUNG JAWAB KEAMANAN daerah sesuai dengan rencana kerja, aturan main dan rambu-rambu masing-masing.

KHUSUS DALAM SETIAP TAHAPAN KEGIATAN JIKA KPU DI DAERAH MASING-MASING MENGALAMI KESULITAN DAN HAMBATAN
Seperti dalam hal penyiapan ruang penyimpanan logistic (Gudang), sosialisasi dan distribusi kartu suara dan lain-lain. Kepala Daerah mendeteksi dan memonitor secara terus menerus kebutuhan itu (misalnya dalam kelancaran penghitungan suara, dll.)

POKOK ISU DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024

Penetapan UU RPJPN 2025-2045 → Rancangan*/Rancangan Akhir RPJPD 2025-2045 → Visi dan Misi Calon Kepala Daerah

Musrenbang RPJPD 2025-2045*

RPJMD Teknokratik 2025-2030

- Pemantapan kebijakan satu data daerah melalui pengoptimalan *e-walidata* dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- Sinkronisasi kebijakan dengan Dokumen Aspasial Nasional (RPJPD dengan RPJPN dan RPJMD dgn RPJMN) dan Dokumen Spasial baik dengan RTRW Nasional serta RTRW Provinsi (Amanat SE Mendagri No. 100.4.4/110/SJ Tahun 2023 Ttg Penyelarasan Dok. Rencana Pembangunan Daerah dengan RTRW)
- Penguatan SDM Perencana dalam menyajikan Dokumen Jangka Menengah dan Panjang yang berkualitas;
- Penyiapan ***exit strategy*** dalam substansi RPJPD 2025-2045 untuk menjaga keberlanjutan momentum Indonesia Emas 2045.

2025

Penetapan Perda RPJPD 2025-2045

Penyusunan dan Penetapan Perpres RPJMN 2025-2029

dan Penetapan Perda RPJMD 2025-

PENUTUP

- **Musrenbang perlu didorong sebagai forum menampung aspirasi dan masukan dari berbagai *stakeholders*** guna memperdalam berbagai perumusan kebijakan perencanaan daerah yang solutif atas permasalahan dan isu pembangunan Tahun 2024;
- **Pengoptimalan** pengelolaan **potensi daerah** sebagai bagian pertimbangan strategis dalam penentuan solusi permasalahan dan isu pembangunan daerah;
- **Kolaborasi berbagai pihak termasuk non pemerintahan (Pentahelix) dengan komitmen yang tinggi** dalam pembangunan dapat diwujudkan dengan kerjasama dengan pembagian peran yang jelas menjadi kunci penyelesaian permasalahan dan isu pembangunan yang kompleks;
- **Memperhatikan dengan aktif berbagai dinamika kebijakan dan arahan pembangunan nasional** Tahun 2024 sebagai bagian dari menjamin sinkronsasi, keselerasan, dan kesinambungan pembangunan Pusat-Daerah.

TERIMA KASIH

www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI kemendagri kemendagri

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

G20 INDONESIA 2022

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif